

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN (STUDI DI KECAMATAN
WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS)**

(Skripsi)

Oleh

**Risandi Koswara
NPM 1916041038**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN (STUDI DI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS)

**Oleh:
Risandi Koswara**

Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam memutus rantai kemiskinan di seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya yaitu di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. PKH adalah bantuan sosial bersyarat yang diperuntukan untuk masyarakat miskin. Kebijakan ini sudah di implementasikan di Kecamatan Wonosobo sejak tahun 2012, namun dalam implementasinya masih ditemui beberapa masalah yang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis ketercapaian implementasi kebijakan PKH dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang dikaji menggunakan indikator implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Wonosobo sudah berjalan dengan cukup baik, implementor sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan PKH, dan kebijakan ini dapat memutus rantai kemiskinan karena adanya pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) yang dapat mengubah pola pikir keluarga penerima manfaat. Namun masih terdapat beberapa masalah yang harus diperbaiki, masalah tersebut diantaranya yaitu masih kurangnya jumlah SDM PKH, jarang dilakukannya kegiatan pendampingan/P2K2, dan masih kurangnya dukungan finansial untuk implementor.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), kemiskinan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) POLICY IN BREAKING THE POVERTY CHAIN (STUDY IN WONOSOBO DISTRICT TANGGAMUS REGENCY)

By:
Risandi Koswara

The Family Hope Program (PKH) policy is an effort by the Indonesian government to break the chain of poverty in all regions of Indonesia, one of which is in Wonosobo District, Tanggamus Regency. PKH is conditional social assistance intended for people experiencing poverty. This policy has been implemented in Wonosobo District since 2012, but in its implementation, there are still some things that need to be fixed in the field. This study aimed to analyze the achievement of PKH policy implementation in breaking the poverty chain in Wonosobo District, Tanggamus Regency, and identify the supporting and inhibiting factors. This study used a qualitative approach with a descriptive research type that was studied using the Van Meter and Van Horn model of policy implementation indicators. Researchers obtained data through observation, interviews, and documentation in this study. Based on the research results on the PKH policy implementation in Wonosobo District, it has been going quite well. The implementers have carried out their duties according to the PKH implementation guidelines, and this policy can break the poverty chain because of family capacity-building meetings (P2K2), which can change the mindset of beneficiary families. However, several problems still need to be fixed, including the lack of PKH human resources, the infrequent assistance/P2K2 activities, and the lack of financial support for implementers

Keywords: *Policy implementation, Family Hope Program (PKH), poverty*

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN (STUDI DI KECAMATAN
WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS)**

Oleh:

Risandi Koswara

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Administrasi Negara**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN (STUDI DI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS)**

Nama Mahasiswa : **Risandi Koswara**

No. Pokok Mahasiswa : **1916041038**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.
NIP 19850620 200812 2 001

Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.
NIP 19780923 200312 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meiliana, S.IP., M.A.
NIP 19740520 200112 2 002

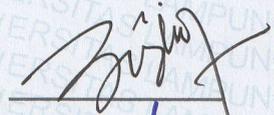
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

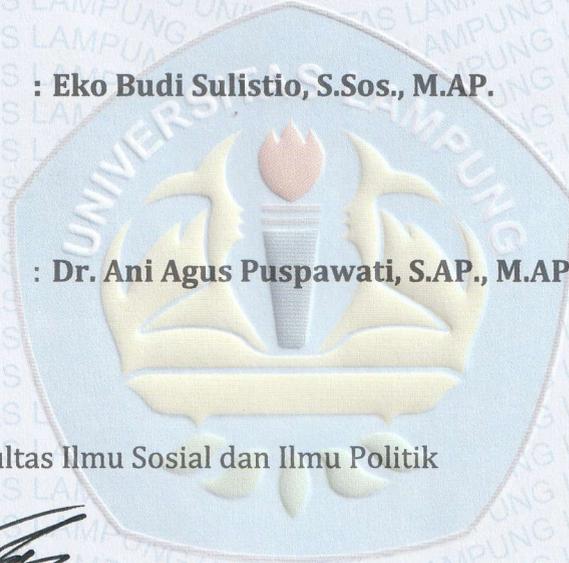
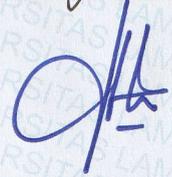
Ketua : Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.



Sekretaris : Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.



Penguji : Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 September 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 13 September 2023
Yang membuat pernyataan,



Risandi Koswara
NPM. 1916041038

RIWAYAT HIDUP



Penulis dengan nama lengkap Risandi Koswara, lahir pada tanggal 18 Mei 2001 di Tangerang. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Yusuf dan Ibu Laura. Memiliki satu adik Perempuan yang bernama Icha Yolanda. Jenjang akademis penulis dimulai dengan menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Sridadi pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Tahun 2016 penulis menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 1 Kotaagung, dan di tahun 2019 penulis menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Kotaagung. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Lampung, terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2019 melalui jalur PMPAP Unila.

Selama menjalani perkuliahan, penulis aktif di beberapa organisasi kampus seperti BEM U KBM Unila sebagai Staff Ahli di Kementrian Advokasi Publik 2020, dan menjadi Kepala Divisi Kewirausahaan di GenBI (Generasi Baru Indonesia) komisariat Universitas Lampung. Selain itu penulis juga aktif dalam mengikuti kegiatan lomba baik nasional maupun internasional, serta aktif dalam mengikuti kegiatan Kampus Merdeka.

Kegiatan Kampus Merdeka yang pernah penulis ikuti selama proses perkuliahan yaitu diantaranya Program Kampus Mengajar di SDN 4 Gisting Atas yang dimulai dari bulan Agustus-Desember 2021, Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di Bawaslu Provinsi Lampung pada bulan Maret-Agustus 2022, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di Bakrie Center Foundation pada bulan Agustus-Desember 2022, Talent Scouting Academy oleh Kominfo pada bulan September-November 2022. Penulis juga melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2022 di Pekon Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri”

(Q.S Ar-Ra'd: 11)

“Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin dialah tergolong orang yang merugi dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin dialah tergolong orang yang celaka.”

(HR. Al-Hakim)

“Kenyamanan adalah jebakan terbesarmu dan keluar dari zona nyaman merupakan tantangan terbesarmu”

(Manoj Arora)

“Jadilah dirimu sendiri, dan berikan yang terbaik disetiap kesempatan”

(Risandi Koswara)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal dan kesempatan, menjadi sebaik baik pelindung, penolong dan pemberi kemudahan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Segala ketulusan hati, saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

Bapak dan Emakku tercinta,

Bapak Yusuf dan Emak Laura

Terimakasih untuk semua doa yang telah dicurahkan untuk saya baik dalam proses penelitian maupun yang lainnya, serta untuk kerja kerasnya supaya saya dapat menjadi orang yang berpendidikan tinggi dan bermanfaat untuk orang lain. Terimakasih karena selalu ada untuk saya, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun bapak dan emak berada.

Almamater Tercinta,

Universitas Lampung

SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan atas segala berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN (STUDI DI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN TANGGAMUS).”** Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali kesulitan yang dihadapi dari awal hingga selesai penulisannya. Berkat bantuan, bimbingan, dorongan serta saran dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut Alhamdulillah dapat diatasi dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis berkuliah hingga selesainya perkuliahan ini.
5. Ms. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing Utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, waktu, nasehat,

dan juga bimbingannya yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga menjadi skripsi yang lebih baik.

6. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP. Selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan yang diberikan, walaupun sebagai pembimbing pembantu tetapi ilmu yang diberikan tetap menyokong dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP. Selaku Dosen Penguji Skripsi Penulis. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun, dan juga bimbingan yang diberikan sehingga membuat penulis menyelesaikan skripsi dengan lebih baik.
8. Ms. Devi Yulianti, S.A.N., M.A. Selaku Dosen Administrasi Negara yang pertama kali memberikan kesempatan mengikuti kegiatan internasional kepada penulis, sehingga penulis bersemangat untuk dapat mengikuti kompetisi dan kegiatan lainnya di tingkat international.
9. Seluruh dosen Jurusan Administrasi Negara, Bapak Dodi, Bapak Simon, Ibu Yuyu, Ibu Vina, Ibu Indri, Bapak Syamsul, Bapak Nana, Bapak Dedy, Ibu Anisa, Prof. Yulianto, Ibu Dian, Ibu Novita, Bapak Noverman, Ibu Dewie, Ibu Selvie, Bapak Irsyad, dan Bapak Apandi. Terima kasih atas semua bimbingan dan pembelajaran yang diberikan Bapak dan Ibu Dosen semuanya, mohon maaf apabila penulis pernah melakukan kesalahan baik kata ataupun perbuatan selama menjadi mahasiswa maupun perwakilan kelas yang seringkali menghubungi dan mengganggu waktu Bapak dan Ibu Dosen.
10. Mba Wulan selaku staf admin di Jurusan Administrasi Negara. Terima kasih banyak atas semua bantuannya dalam mengurus administrasi penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga menyelesaikan proses perkuliahan.
11. Bapak Slamet dan Bapak Aji selaku implementor PKH Lampung sekaligus mentor saya selama mengikuti kegiatan Magang di Bakrie Center Foundation. Terima kasih banyak atas semua bimbingan dan arahnya, semoga bapak diberi kesehatan selalu dan dilimpahkan rezekinya. Tak lupa juga Yondri, Taufik, Nisa, dan Ayas selaku teman-teman di divisi advokasi, makasih untuk semua cerita dan

pengalamannya selama satu semester bersama, kalian kerenn, sampai bertemu di puncak.

12. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang Bapak Yusuf dan Emak Laura. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena selalu memberikan yang terbaik untuk saya. Terima kasih atas semua didikan, kasih sayang, pengorbanan, dan doanya, semoga Allah selalu memberikan kelimpahan berkah dan kesehatan serta umur yang panjang kepada emak dan bapak. Semoga kelak anakmu dapat menjadi orang yang sukses dan dapat membahagiakan emak, bapak, serta dapat mengangkat derajat keluarga.
13. Adik tersayang Icha Yolanda, terima kasih karena sudah memberikan *support* dan sudah menjadi adik yang penurut saat penulis pulang ke rumah, semangat sekolahnya, dan semoga seluruh cita-citanya dapat terkabul, agar kelak kita dapat membahagiakan kedua orang tua.
14. Terima kasih untuk Tamong Masnurin karena telah menemani dan membimbing saya dari awal proses menuju dunia perkuliahan, mulai dari *tryout*, tes seleksi masuk, sampai dengan akhir proses perkuliahan.
15. Terima kasih untuk Minan Evi karena sudah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada saya dan keluarga agar dapat melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, karena benar adanya rezeki akan selalu ada untuk orang-orang yang ingin berusaha, terima kasih banyak atas motivasi dan seluruh dukungannya sehingga saya dapat meraih gelar sarjana.
16. Teman-teman seperjuangan (Granada) Anada, Amalia, Dinda, Anin, Nichol, Arif, Indra, Oliv, Nina, Made, Ipah, Kezia, Ivan, Jono, Aidila, Amel, Faradilla, Topan, Atha, Cinta, Adit, Egi, Hendra, Putri, Siti, Zahra, Indri, Agata, Sabrina, Risdan, Reza, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, senang bisa mengenal kalian semua, orang-orang keren dari berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih karena sudah berproses bersama kurang lebih 4 tahun ini, semoga seluruh cita-cita kita dapat terkabul, aamiin.
17. Terima kasih untuk mba abang Himagara terkhusus Mba Rani, Mba Else, Mba Dela, Bang Chiesa, Bang Riki, Mba Zanu, Mba Padila, Bang Eldo, Bang Panji,

Mba Rizki, Mba Diah, serta abang mba lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua bantuannya selama perkuliahan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

18. Terima kasih untuk adik-adik di Jurusan Administrasi Negara, Denti, Atika, Esa, Risma, Resta, Ilham, Anjas, Amel, Indra, Farhan, Agil, Devi serta adik-adik lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semangat kuliahnya untuk kalian semua, terima kasih atas semua bantuannya.
19. Sahabat dalam segala hal Fadil dan Laila, terima kasih sudah menjadi teman terbaik penulis selama menjalani perkuliahan, terima kasih karena sudah mau diajak kesana kemari, dan mencari promoan, semoga kedepannya kita bisa menjadi orang yang saat belanja tidak lagi melihat harga (orang kaya).
20. Sahabat senasib sepenanggungan, Sinta dan Marfu. Terima kasih karena selalu mendengarkan keluh kesah peneliti, terima kasih atas motivasi dan dukungannya.
21. Sobat Missqueenku, Kak Tania, Kak Yuyun, Bang Redo, Bang Heri. Terima kasih atas semua cerita dan canda tawa yang telah kalian berikan. Terimakasih sudah menjadi keluarga yang baik dan selalu ada, sukses untuk kita semua.
22. Teman-teman di Kost Eko Wijayanti, Saldi, Fadil, Erik, Fajar, Agas, Ghani, Asrul. Terima kasih sudah menemani penulis kurang lebih selama 4 tahun, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis mohon maaf jika selama di kosan sering merepotkan teman-teman, semangat dalam menjalani prosesnya masing-masing.
23. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu Kost Eko Wijayanti yang sangat pengertian dan peduli dengan kami selaku anak kostnya, berkah selalu untuk ibu sekeluarga, dan semoga dimudahkan rezekinya, aamiin.
24. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuannya.

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran agar karya tulis selanjutnya dapat lebih baik. Sedikit harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 13 September 2023

Penulis,

Risandi Koswara

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kebijakan Publik	11
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	11
2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik.....	13
2.2.3 Proses Kebijakan Publik.....	13
2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	16
2.3.2 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	18
2.4 Program Keluarga Harapan (PKH).....	25
2.4.1 Pengertian PKH.....	25
2.4.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	26
2.4.3 Kriteria Penerima Manfaat PKH	27
2.4.4 Alur Pelaksanaan PKH.....	28
2.5 Kemiskinan.....	30
2.5.1 Pengertian Kemiskinan.....	30

2.5.2 Rantai Kemiskinan.....	33
2.5 Kerangka Pikir.....	34
III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	37
3.2 Fokus Penelitian.....	37
3.3 Lokasi Penelitian	40
3.4 Sumber Data	40
3.4.1 Data Primer	40
3.4.2 Data Sekunder	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.5.1 Observasi.....	42
3.5.2 Wawancara.....	42
3.5.3 Dokumentasi.....	43
3.6 Teknik Analisis Data	44
3.6.1 Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	44
3.6.2 Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	45
3.6.3 Penarikan Kesimpulan.....	45
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	45
3.7.1 Uji <i>Credibility</i>	46
3.7.2 Uji <i>Transferability</i>	47
3.7.3 Uji <i>Dependability</i>	47
3.7.4 Uji <i>Confirmability</i>	47
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum	48
4.1.1 Profil Kecamatan Wonosobo	48
4.1.2 Letak Geografis dan Luas Wilayah Kecamatan Wonosobo	49
4.1.3 Topografi dan Iklim di Kecamatan Wonosobo	50
4.1.4 Demografi Kecamatan Wonosobo	50
4.2 Hasil Penelitian	54
4.2.1 Implementasi Kebijakan PKH dalam Memutus Rantai Kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus	54

4.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan PKH dalam Memutus Rantai Kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus	83
4.3 Pembahasan Penelitian	88
4.3.1 Implementasi Kebijakan PKH dalam Memutus Rantai Kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus	89
4.3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan PKH dalam Memutus Rantai Kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus	98
V. KESIMPULAN DAN SARAN	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Jumlah KPM PKH di Kabupaten Tanggamus	4
Tabel 2. Jumlah KPM PKH di Kecamatan Wonosobo	5
Tabel 3. Daftar Informan.....	43
Tabel 4. Dokumentasi	43
Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kecamatan Wonosobo tahun 2021	51
Tabel 6. Sebaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Wonosobo tahun 2021	52
Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kecamatan Wonosobo tahun 2022	53
Tabel 8. Hubungan Implementasi Kebijakan PKH antar Instansi	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Faktor Penentu Implementasi Menurut Edward III.....	20
Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn....	22
Gambar 3. Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4. Komponen Analisis Data: Model Interaktif	44
Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan P2K2 di Pekon Sopyono.....	66
Gambar 6. Koordinasi Pendamping dengan Instansi Pendidikan	67
Gambar 7. Pendampingan Proses Pencairan Dana Bantuan PKH	73
Gambar 8. Pemberdayaan KPM PKH untuk Dapat Mengolah Hasil Bumi di Lingkungan Sekitar (Pembuatan Pisang Sale)	75

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah yang dihadapi oleh seluruh provinsi dan daerah di Indonesia, salah satunya termasuk Provinsi Lampung. Menurut Supriatna (1997) dalam Takaredase *et al.*, (2019) kemiskinan merupakan suatu situasi yang serba terbatas, situasi tersebut bukan kehendak dari orang yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan rantai kemiskinan adalah suatu konsep yang menjelaskan bagaimana kemiskinan dapat ditransmisikan atau diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konsep ini menggambarkan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah individu atau keluarga, tetapi juga merupakan hasil dari faktor-faktor sistemik yang berinteraksi satu sama lain. Menurut Auliyah (2013) dalam Permana *et al.*, (2018) kemiskinan juga dapat menciptakan *multiplier effect* atau efek yang cenderung menyebar untuk kehidupan masyarakat secara keseluruhan, yang mana kebutuhan dasar masyarakat tidak dapat dipenuhi. Sehingga berbagai macam persoalan kemiskinan membutuhkan upaya pencegahan dan penyelesaian yang lengkap dan menyeluruh, mencakup keanekaragaman aspek kehidupan dalam masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan baik.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yaitu taraf pendidikan yang masih rendah. Pendidikan menjadi sangat penting dalam membantu seseorang untuk keluar dari rantai kemiskinan, karena dengan menempuh pendidikan yang tinggi, maka akan mengubah pola pikir, meningkatkan keterampilan, dan dapat berkembang melalui ilmu pengetahuan. Selain itu faktor lain yang menyebabkan kemiskinan yaitu faktor kesehatan yang rendah. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dibandingkan masyarakat yang sering mengalami sakit, karena

masyarakat yang sehat dapat melakukan pekerjaan dengan baik, menempuh pendidikan tinggi, dan dapat melakukan kegiatan positif lainnya (Yulizar, 2022).

Provinsi Lampung sendiri menurut Badan Pusat Statistik, pada bulan September 2022 jumlah penduduk yang tercatat ada di bawah garis kemiskinan yaitu mencapai 995.59 ribu jiwa atau 11,44% dari jumlah total penduduk di Provinsi Lampung yang menyebar diberbagai kabupaten yang ada (BPS Provinsi Lampung, 2023). Sedangkan di Kabupaten Tanggamus sendiri total jumlah penduduk pada tahun 2022 yaitu sebanyak 652.898 ribu jiwa, dan jumlah penduduk yang tercatat ada dibawah garis kemiskinan yaitu sebesar 67.43 ribu jiwa yang menyebar ke-20 kecamatan (BPS Kabupaten Tanggamus, 2022a).

Sebagai upaya dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah membuat kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah di implementasikan sejak tahun 2007. Adapun di Provinsi Lampung PKH ini telah diimplementasikan sejak tahun 2011 dan di Kabupaten Tanggamus PKH telah diimplementasikan sejak tahun 2012.

PKH adalah bantuan sosial bersyarat yang dinaungi oleh Kementerian Sosial, program ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), memiliki komponen peserta PKH, dan selanjutnya ditetapkan menjadi Keluarga Penerima Manfaat PKH. Tujuan dari PKH yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan pendapatan keluarga dan mengurangi beban pengeluaran, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat, dan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat dengan cara memberikan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Adapun kriteria penerima bantuan PKH meliputi tiga komponen yaitu, Komponen kesehatan yang meliputi ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan yang meliputi SD/MI atau sederajat, SMP/MTS atau sederajat, SMA/MA atau sederajat, dan komponen

kesejahteraan sosial yang meliputi lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun & penyandang disabilitas (Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2021).

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yaitu mengikuti pendampingan dan memenuhi kewajiban sesuai komponen. Pendampingan untuk KPM PKH bertujuan untuk mencapai salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan kemandirian dan perubahan perilaku terkait dengan pemanfaatan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sehingga harapannya dapat memutus kemiskinan antargenerasi. Pendampingan KPM PKH dapat dilakukan melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan difasilitasi oleh pendamping sosial PKH. Pertemuan Kelompok (PK) membahas tentang pelaksanaan tugas yang bersifat edukatif dan administratif dengan memberi informasi tentang tata tertib dan aturan PKH, serta akses terhadap layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan KPM PKH. Sedangkan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yaitu proses belajar secara terstruktur agar dapat mempercepat terjadinya perubahan perilaku KPM PKH. Tujuan P2K2 yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak, pengelolaan keuangan, kesehatan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga, sehingga dapat mendorong terjadinya percepatan perubahan perilaku (Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2021).

Tabel 1. Jumlah KPM PKH di Kabupaten Tanggamus

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KPM
1	Air Nainingan	1.701
2	Bandar Negeri Semuong	1.201
3	Bulok	1.712
4	Cukuh Balak	1.763
5	Gisting	974
6	Gunung Alip	1.171
7	Klumbayan	1.030
8	Klumbayan Barat	1.006
9	Kota Agung	2.710
10	Kota Agung Barat	1.481
11	Kota Agung Timur	1.475
12	Limau	1.379
13	Pematang Sawa	1.526
14	Pugung	3.953
15	Pulau Panggung	2.557
16	Semaka	2.520
17	Sumber Rejo	1.400
18	Talang Padang	3.035
19	Ulu Belu	1.748
20	Wonosobo	3.374
Jumlah		37.716

Sumber: Dokumen Penyaluran Bantuan Tahap Empat UPPKH Kabupaten Tanggamus, 2022.

Berdasarkan tabel 1 diatas jumlah KPM PKH di Kabupaten Tanggamus memiliki jumlah penerima yang berbeda-beda disetiap kecamatannya, hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk miskin di kecamatan tersebut. Kecamatan yang mempunyai jumlah KPM PKH terbanyak yaitu berada di Kecamatan Pugung, dengan jumlah 3.953 KPM, sedangkan kecamatan yang mempunyai jumlah KPM PKH terendah yaitu berada di Kecamatan Gisting, dengan jumlah 974 KPM. Wonosobo masuk kedalam peringkat kedua dengan jumlah KPM PKH terbanyak di Kabupaten Tanggamus, yaitu sebanyak 3.374 KPM.

Tabel 2. Jumlah KPM PKH di Kecamatan Wonosobo

NO	DESA	JUMLAH KPM
1	Bandar Kejadian	139
2	Banjar Negara	109
3	Banjar Sari	163
4	Banyu Urip	81
5	Dadimulyo	74
6	Dadirejo	87
7	Dadisari	88
8	Kalirejo	124
9	Kalisari	109
10	Karang Anyar	89
11	Kejadian	109
12	Kunyayan	230
13	Lakaran	67
14	Negeri Ngarip	191
15	Padang Manis	90
16	Padang Ratu	110
17	Pardasuka	78
18	Pekon Balak	121
19	Sampang Turus	69
20	Sinar Bangun	24
21	Sinar Saudara	101
22	Soponyono	126
23	Sri Melati	14
24	Sridadi	102
25	Sumur Tujuh	53
26	Tanjung Kurung	45
27	Way Liwok	35
28	Way Panas	179
29	Wonosobo	567
Jumlah		3.374

Sumber: Dokumen Penyaluran Bantuan Tahap Empat UPPKH Kecamatan Wonosobo, 2022.

Berdasarkan tabel 2 di atas jumlah penerima bantuan PKH di Kecamatan Wonosobo pada tahun 2022 yaitu sebanyak 3.374 KPM, hal tersebut menandakan bahwa masih banyak terdapat keluarga miskin yang harus diperhatikan kesejahteraannya. Dalam proses implementasinya, PKH di Kecamatan Wonosobo ditemui beberapa masalah antara lain, dikutip dari “Net24jam.id” terdapat praktik

pemotongan Dana Bantuan Lanjut Usia dari PKH yang terjadi di Pekon Dadimulyo. Pelanggaran penyaluran dana bantuan PKH tersebut dilakukan oleh Wh selaku ketua kelompok PKH Pekon Dadimulyo Kecamatan Wonosobo, pada Januari 2023. Adapun korban pemotongan dana tersebut yaitu Sm dan Ki, serta beberapa KPM PKH lainnya. Pemotongan dana tersebut dilakukan Wh dengan cara mengumpulkan ATM penerima, dan memberikan informasi bahwa saldo PKH milik penerima tersebut kosong. Masalah lainnya yaitu dikutip dari “Lampung7com” bahwa terdapat dugaan data PKH yang tidak tepat sasaran. Masih banyak warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH, sedangkan ada sebagian warga yang dinilai sudah mampu dan masih mendapatkan bantuan PKH.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan PKH terjadi karena kurangnya komitmen implementor dalam menjalankan tugasnya dengan baik, Struktur Birokrasi dan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) yang belum dilaksanakan sepenuhnya, minimnya peraturan yang tegas dalam menindak implementor yang lalai menjalankan tugas atau implementor yang memiliki tugas kerja ganda, dan belum terpenuhinya sumber daya kebijakan baik dari segi sumber daya finansial maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan bantuan PKH yang telah dibuat oleh pemerintah tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan jika kebijakan tersebut belum diimplementasikan dengan baik (Linawati, 2016).

Suatu kebijakan harus diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dapat memberikan dampak, serta perubahan. Menurut Udoji dalam Yulianti (2018) proses yang penting dari kebijakan publik adalah pelaksanaan kebijakan, hal tersebut lebih penting dari pada proses pembuatan kebijakan. Implementasi menjadi proses paling mendasar dalam sebuah kebijakan. Proses implementasi menjadi hal yang menarik untuk digali lebih jauh karena dalam implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Implementasi tidak selalu berjalan dengan baik, operasional program atau aplikasi yang sudah dirancang sebelumnya akan menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam proses

implementasi kebijakan. Permasalahan yang ditemui dalam proses pelaksanaan PKH di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus penting untuk diteliti karena suatu kebijakan tidak akan mencapai tujuan yang telah ditentukan jika tidak diimplementasikan dengan baik, maka penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Studi di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan PKH dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan PKH dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis ketercapaian implementasi kebijakan PKH dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus
2. Teridentifikasinya faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan PKH dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan informasi terkait implementasi kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan PKH, serta dapat menjadi bahan referensi untuk yang memerlukan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi koreksi bagi pemerintah dalam proses implementasi kebijakan PKH, dan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya memutus rantai kemiskinan, khususnya di Kecamatan Wonosobo.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu acuan peneliti dalam melakukan penelitian guna menambah ilmu pengetahuan mengenai bahasan yang peneliti lakukan. Peneliti menggunakan beberapa acuan yang menjadi sumber informasi yang relevan dalam mengkaji masalah yang diteliti. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji masalah yang akan diteliti.

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yulizar, 2022) berjudul “*Keberhasilan Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)*”. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah kajian yang dibahas mengenai PKH dan pengentasan kemiskinan, serta persamaan pada metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu membahas tentang bentuk keberhasilan dari Program Keluarga Harapan yang ada di kelurahan Way Dadi sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Teori yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu teori keberhasilan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan. Serta lokasi penelitian terdahulu di kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung sedangkan penelitian ini di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Linawati, 2016) berjudul *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur”* Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus penelitian dimana sama-sama membahas tentang implementasi PKH dalam memutus rantai kemiskinan. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada fokus masalah penelitian dimana penelitian terdahulu membahas tentang masalah jumlah penerima bantuan yang tidak valid sedangkan masalah pada penelitian ini yaitu ditemui dugaan pemotongan dana bantuan PKH dan masalah kurang tepatnya data penerima. Terdapat gap terhadap pembaruan data penelitian, penelitian terdahulu menggunakan data PKH pada tahun 2015 sedangkan penelitian ini menggunakan data PKH tahun 2022. Penelitian terdahulu terkait dengan kontribusi PKH pada pencapaian *Millennium Development Goals* atau MDGs sedangkan penelitian ini terkait dengan kontribusi PKH pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Serta lokasi penelitian terdahulu di Kabupaten Lampung Timur sedangkan penelitian ini di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.
3. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Ibrahim, 2022) berjudul *“Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato”*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah kajian yang dibahas mengenai implementasi kebijakan PKH, dan persamaan pada metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada permasalahan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan PKH dimana penelitian terdahulu membahas tentang masalah lambatnya penyaluran dana PKH kepada peserta, sedangkan penelitian ini membahas tentang dugaan pemotongan dana bantuan oleh fasilitator PKH. Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada lokasi penelitian yang mana

penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato, sedangkan penelitian ini di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan perbandingan penelitian terdahulu yang sudah dideskripsikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun hal yang ingin dikaji pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan PKH dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini memiliki kajian yang sama terhadap penelitian terdahulu, yaitu mengenai PKH. Akan tetapi hal tersebut tidak menjamin kesamaan hasil penelitian, karena terdapat perbedaan fokus dan lokus pada penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah salah satu tindakan atau upaya pemerintah yang dibuat dengan tujuan melaksanakan tugas-tugas dalam pemerintahan dengan wujud keputusan atau pengaturan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik adalah hasil dari proses politik yang dijalankan dalam sistem pemerintahan suatu negara, yang didalamnya terdapat langkah-langkah yang wajib dijalankan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Selain itu kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang mengikat untuk banyak orang dalam tataran strategis atau bersifat garis besar yang telah dibuat oleh pemegang otoritas publik. Fokus utama dalam kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Menyeimbangkan peran negara dalam menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat

dengan berbagai kepentingan, menarik pajak dan retribusi, serta mencapai amanat konstitusi (Anggara, 2014).

Menurut Friedrich (1963) dalam Hamdi (2014) mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan terkait pemerintah, kelompok, atau perorangan dalam suatu lingkungan tertentu yang terdapat hambatan ataupun kesempatan yang akan ditangani atau dimanfaatkan lewat kebijakan yang direkomendasikan dalam usaha mewujudkan suatu maksud atau mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut James Anderson (1979) dalam Mustari (2015) berpendapat bahwa kebijakan dapat dipergunakan dalam menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya suatu lembaga pemerintah, seorang pejabat, maupun suatu kelompok) atau beberapa aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Dalam arti yang luas kebijakan publik adalah usaha pengadaan informasi yang diperlukan dalam menunjang proses perumusan kebijakan atau proses pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal organisasi serta mengetahui arti dari keputusan. Namun, ilmu kebijakan baru diakui keberadaannya setelah terjadinya Perang Dunia II. Kajian-kajian pada masa lampau biasanya berupa kajian dari satu disiplin ilmu dan untuk menangani permasalahan yang hanya dianggap sebagai aspek tertentu yang relevan dengan disiplin ilmu itu, kajian tersebut mulai sulit untuk dapat memecahkan masalah-masalah kompleks dalam masyarakat modern sekarang ini. Dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini, di tengah era globalisasi permasalahan publik menjadi sangat kompleks, sebagai akibat dari kemajuan teknologi dalam bidang transportasi dan informasi. Kajian dari satu disiplin ilmu saja menjadi kurang realistis karena hasil jawabannya terbatas dalam kerangka teoritis tertentu, kurang relevan dengan masyarakat modern yang saat ini berkembang secara cepat (Abidin, 2019).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai kebijakan publik maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang berisi peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau institusi publik untuk mengatasi isu-isu publik, mengatur perilaku masyarakat, atau mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri umum kebijakan publik:

1. Otoritas Pemerintah: Kebijakan publik dihasilkan oleh otoritas pemerintah atau institusi publik yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan dalam lingkup tertentu. Kebijakan publik biasanya dibuat oleh lembaga eksekutif, legislatif, atau birokrasi pemerintah.
2. Tujuan Publik: Kebijakan publik bertujuan untuk mencapai manfaat atau kepentingan umum. Tujuan-tujuan ini dapat beragam, seperti meningkatkan pelayanan publik, mengatasi masalah sosial, mencapai pembangunan ekonomi, atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Pengaruh Sosial: Kebijakan publik berdampak pada masyarakat secara luas. Mereka mencoba mengubah perilaku, mengatur kegiatan, atau mempengaruhi keadaan sosial, ekonomi, atau lingkungan.
4. Dasar Hukum: Kebijakan publik didasarkan pada hukum dan peraturan yang ada, baik di tingkat nasional maupun lokal. Mereka harus sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku dan mempertimbangkan hak asasi manusia, keadilan, dan prinsip-prinsip konstitusional.
5. Proses Pembuatan Keputusan: Kebijakan publik melibatkan proses pembuatan keputusan yang sistematis dan rasional. Hal ini melibatkan

analisis isu, pengumpulan data, konsultasi publik, pertimbangan berbagai sudut pandang, dan penentuan strategi dan tindakan yang akan diambil.

6. Implementasi dan Evaluasi: Kebijakan publik harus diimplementasikan secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, evaluasi kebijakan juga penting untuk memeriksa apakah tujuan telah tercapai, dampaknya sudah diukur, dan apakah diperlukan perubahan atau penyesuaian lebih lanjut.
7. Pilihan Terbatas dan Trade-off: Kebijakan publik seringkali melibatkan pilihan terbatas dan trade-off antara berbagai tujuan dan sumber daya yang terbatas. Pemerintah harus memilih prioritas, mengalokasikan sumber daya yang terbatas, dan mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari kebijakan tersebut.
8. Interaksi dengan Masyarakat: Kebijakan publik melibatkan interaksi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait. Konsultasi publik, partisipasi warga, dan kerja sama dengan sektor swasta atau organisasi masyarakat sipil seringkali penting dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan.

Setiap kebijakan publik memiliki konteks dan karakteristiknya sendiri, tergantung pada isu yang sedang dihadapi dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di mana kebijakan tersebut beroperasi

2.2.3 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik menurut James Anderson (1979) dalam Subarsono (2022) sebagai berikut.

1. Formulasi Masalah (*problem formulation*)

Formulasi masalah yaitu suatu proses pencarian masalah, dan mencari tahu apa yang membuat hal tersebut menjadi suatu masalah kebijakan. Formulasi masalah ini merupakan tahapan penting dalam

mengidentifikasi bagaimana suatu masalah tersebut dapat diangkat menjadi agenda pemerintah.

2. Formulasi Kebijakan (*formulation*)

Formulasi kebijakan merupakan suatu proses dalam mengembangkan alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan untuk dapat memecahkan suatu masalah, dan untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan.

3. Penentuan Kebijakan (*adoption*)

Proses penentuan kebijakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu alternatif dapat ditetapkan, dan mengetahui persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi. Selain itu tahapan penentuan kebijakan bertujuan untuk mengetahui siapa yang akan melaksanakan kebijakan, dan bagaimana tahapan atau strategi dalam melaksanakan kebijakan, serta mengetahui isi dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Implementasi (*implementation*)

Implementasi bertujuan untuk mengetahui siapa aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, dan mengetahui apa yang sedang mereka kerjakan. Selain itu dengan adanya implementasi kebijakan maka akan diketahui bagaimana dampak dari isi kebijakan.

5. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi yaitu suatu proses penilaian tingkat keberhasilan atau dampak dari suatu kebijakan. Selain itu evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan, dan mengetahui apakah ada tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan.

Berdasarkan dari proses kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh James Anderson (1979) maka yang menjadi fokus dalam pembahasan penelitian ini yaitu tahapan implementasi kebijakan. Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan, mengetahui siapa saja yang

terlibat dalam implementasi kebijakan dan apa yang mereka lakukan, serta mengetahui dampak dari implementasi kebijakan tersebut.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap implementasi dapat menentukan apakah suatu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat diaplikasikan dengan benar di lapangan dan mampu menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. Dalam upaya mewujudkan *output* dan *outcomes* yang telah ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan (Sasmito & Nawangsari, 2019). Selain itu implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, pada umumnya dalam bentuk undang-undang, namun dapat juga berbentuk petunjuk eksekutif atau perintah, atau keputusan badan peradilan (Meutia, 2017).

Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan setelah kebijakan dirumuskan. Tanpa adanya proses implementasi maka suatu kebijakan yang sudah dirumuskan akan menjadi sia-sia. Karena hal tersebut proses implementasi kebijakan menjadi proses yang penting di dalam kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah akan menjadi impian atau rancana yang bagus, yang hanya tersimpan rapi dalam arsip kalau kebijakan tersebut tidak diimplementasikan (Ibrahim, 2022).

Menurut Syauckani (2004) dalam Dzulkarnain *et al.*, (2022) implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang telah dirancang untuk dapat mengkomunikasikan suatu kebijakan kepada publik sehingga kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang diinginkan. Serangkaian kegiatan

tersebut meliputi: (1) proses pengembangan seperangkat peraturan secara lebih lanjut sebagai bentuk interpretasi kebijakan; (2) menyediakan sumber daya agar dapat mendorong kegiatan implementasi, termasuk sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, serta melakukan identifikasi terhadap siapa yang akan bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan; (3) bagaimana cara menyampaikan kearifan yang konkrit kepada publik. Selain itu menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Dzulqarnain *et al.*, (2022) proses implementasi merupakan suatu arah yang diambil oleh kelompok atau individu dalam mencapai suatu tujuan ketika berada dalam proses pelaksanaan kebijakan, dan pastinya dalam melaksanakan suatu kebijakan harus berlandaskan dengan peraturan.

Dalam proses implementasi kebijakan dikenal dengan dua pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*. Pendekatan *top down* diartikan bahwa pendekatan tersebut dimulai dari atas yakni pemerintah, dalam keadaan ini sering ditemukan proses perumusan kebijakan yang hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di lapangan, karena hal tersebut tidak jarang suatu kebijakan yang memakai pendekatan ini cenderung gagal dan tidak dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan pendekatan *bottom up* yakni suatu proses perumusan kebijakan publik yang dimulai dari bawah, hal tersebut berarti segala permasalahan yang ada dalam masyarakat selanjutnya dibahas oleh pemerintah agar dapat mencari solusi alternatif kebijakan yang sesuai, biasanya dengan menggunakan pendekatan ini kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah cenderung efektif karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Mahardhani, 2018).

PKH menggunakan pendekatan *bottom up* karena program ini dimulai dari bawah dengan melihat adanya masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Permasalahan kemiskinan tersebut kemudian dibahas oleh pemerintah dan solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut yaitu dengan

menerapkan kebijakan PKH yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2007. Selain itu PKH juga melibatkan kelompok sasarannya mulai dari awal proses sampai ke-tahap implementasi kebijakan.

2.3.2 Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik mempunyai beberapa macam model yang telah dikemukakan oleh berbagai ahli. Berikut adalah beberapa model implementasi menurut beberapa ahli.

1. Model Implementasi Marille S. Grindle

Model implementasi menurut Grindle (1980) dalam Subianto (2020) adalah suatu model konseptual dan kerangka pemikiran implementasi sebagai proses administrasi dan proses politik. Kerangka pemikiran yang dimaksud di atas disusun dari dua pertanyaan pokok. Pertanyaan pertama membahas tentang “Content” atau isi dari program. Pengaruh bisa terjadi dikarenakan isi dari program terhadap proses implementasi. Pertanyaan kedua yaitu membahas tentang “Context” (Kondisi Lingkungan) yang memiliki hubungan atau kaitan pengaruh terhadap proses implementasi. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditentukan oleh dua variabel, variabel pertama yaitu isi kebijakan (*Content variable*), dan variabel kedua yaitu konteks kebijakan (*Context variable*). Adapun penjelasan mengenai isi dan konteks kebijakan menurut Grindle sebagai berikut.

Variabel isi kebijakan terdapat enam unsur, yaitu:

- a) Pihak yang kepentingannya dipengaruhi (*Interest affected*). Kebijakan yang telah dibuat dapat membawa pengaruh terhadap proses politik yang di “stimuli” dari kegiatan perumusan kebijakan.

- b) Manfaat yang diperoleh (*Type of benefits*).
Program yang memberikan manfaat kolektif akan lebih mudah dalam proses implementasinya. Program yang hanya memberikan manfaat dan bisa dibagi habis yang bersifat khusus bisa mempertajam konflik.
- c) Jangkauan yang diharapkan (*Exstent of change envisioned*)
Program yang berlangsung dalam jangka Panjang, dan menuntut perubahan pelaku, akan cenderung sulit dalam implementasinya.
- d) Letak pengambilan keputusan (*Site of decision making*)
Semakin tersebar implementor (secara organisasi, dan geografis), maka akan semakin sulit program tersebut diimplementasikan.
- e) Pelaksana program (*Program implementor*)
Kualitas dari pelaksana program dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam implementasi.
- f) Sumber-sumber yang dapat dialokasikan (*Resources comitted*).
Ketersediaan sumber daya yang memadai mampu mendukung implementasi suatu program.

Variabel konteks terdapat tiga unsur, yaitu:

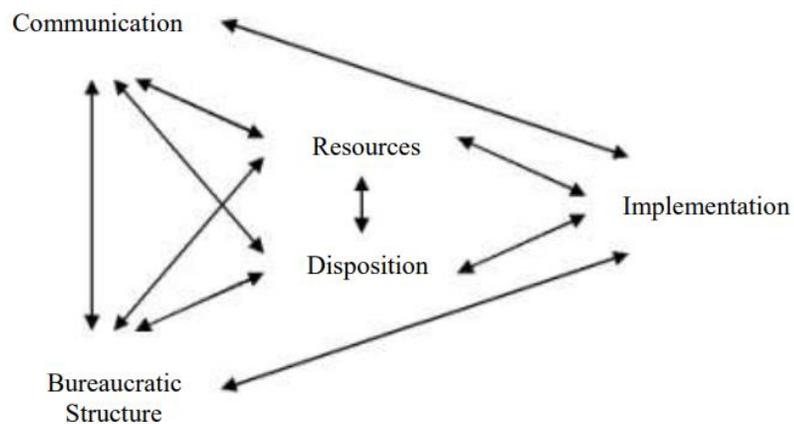
- a) Kekuasaan, kepentingan serta strategi dari para aktor yang terlibat (*Power, interest and strategies of actor involved*).
Keterlibatan berbagai pihak dapat ditentukan oleh isi dan bentuk dari program yang diadministrasikan.
- b) Ciri-ciri kelembagaan/rezim (*Institution and regime characteristics*).
Kekuasaan atau kemampuan dari pihak-pihak yang terlibat dan karakteristik dari rezim dimana berinteraksi akan memudahkan proses penilaian terhadap tingkat peluang untuk mewujudkan tujuan program atau kebijakan.

c) Responsi dan daya tanggap (*Compliance and responsiveness*).

Pejabat pelaksana seharusnya fokus pada: cara mewujudkan konsistensi tujuan dalam kebijakan. Maka pejabat pelaksana harus mampu dalam merubah sikap menentang dari yang dirugikan oleh kebijakan atau program menjadi menerima.

2. Model Implementasi George C. Edward III

Menurut George C. Edward III (1980) dalam Pramono (2020) berpandangan bahwa implementasi adalah suatu proses kebijakan yang dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1) komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; (4) struktur birokrasi.



Gambar 1. Faktor Penentu Implementasi Menurut Edward III

Sumber: Edwards III (1980) dalam Subarsono (2022)

a) Komunikasi

Komunikasi adalah keberhasilan proses implementasi kebijakan mensyaratkan supaya implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi sasaran dan tujuan kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan konsisten dan jelas, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya dalam melaksanakan kebijakan, maka implementasinya tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya tersebut bisa berwujud sumber daya manusia maupun sumberdaya non-manusia

c) Disposisi

Disposisi adalah karakteristik dan watak yang dimiliki oleh implementor, seperti kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, maka implementor tersebut mampu menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor mempunyai sikap atau perspektif yang bertolak belakang dengan pembuat kebijakan, maka proses dalam implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi

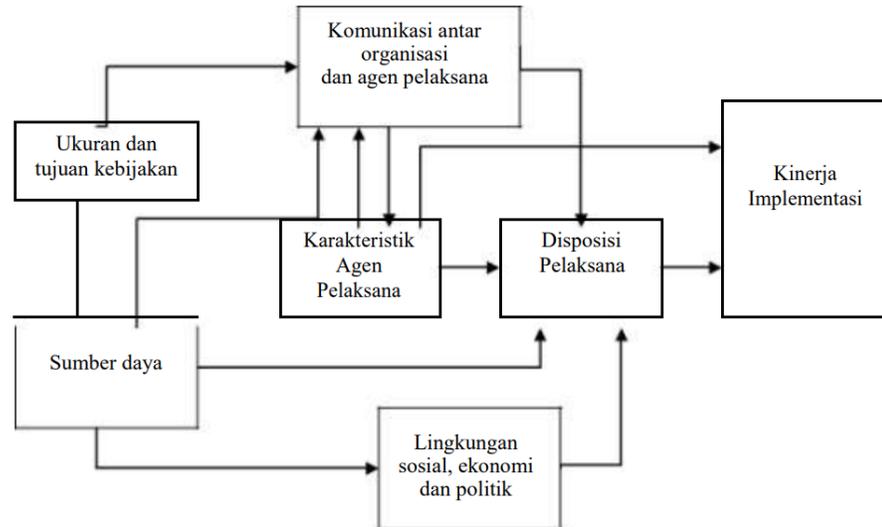
Struktur organisasi yang mempunyai tugas dalam mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah fragmentasi dan *standard operating prosedur* (SOP). Struktur organisasi yang mempunyai proses terlalu panjang dapat melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu prosedur dalam birokrasi yang kompleks dan rumit, yang menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3. Model Implementasi Van Metter dan Van Horn

Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022) model implementasi mempunyai enam indikator yang mempengaruhi kinerja, yaitu; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik

agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik; (6) disposisi implementor.

Adapun penjelasan alur mengenai indikator yang mempengaruhi kinerja menurut Van Meter dan Van Horn dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

Sumber: Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022)

a) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus dapat terukur dan jelas sehingga dapat direalisasikan. Apabila sasaran dan standar kebijakan kabur, maka akan menimbulkan multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

b) Sumberdaya

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumberdaya yang meliputi sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Dalam beberapa kasus program pemerintah, seperti Program Jaring Pengamanan Sosial

(JPS) yang diperuntukan untuk keluarga miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas implementor.

c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Sebuah program memerlukan koordinasi dan dukungan dari instansi lain. Karena hal tersebut, diperlukan kerjasama dan koordinasi antar instansi untuk mencapai keberhasilan suatu program.

d) Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, dan norma-norma, yang semuanya itu dapat mempengaruhi implementasi suatu program.

e) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang mampu mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Karakteristik para partisipan yaitu menolak atau mendukung bagaimana sifat dari opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung dalam proses implementasi kebijakan.

f) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu; (1) respons implementor terhadap kebijakan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam melaksanakan kebijakan; (2) kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan; (3) Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

4. Pendekatan Implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier
Menurut pandangan Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Subarsono (2022) terdapat tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*); (2) karakteristik Kebijakan/undang-undang (*ability of*

statute to structure implementation); (3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Adapun penjelasan variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier yaitu sebagai berikut.

a) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*).

Kategori ini meliputi variabel-variabel yang terdiri dari: (1) tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; (2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; (3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; (4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

b) Karakteristik Kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*).

Kategori karakteristik kebijakan meliputi variabel-variabel yang terdiri dari: (1) Kejelasan isi kebijakan; (2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; (3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut; (4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instansi pelaksana; (5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; (6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; (7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

c) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Kategori lingkungan meliputi variabel-variabel yang terdiri dari: (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; (2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; (3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*); (4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Dari beberapa model implementasi menurut para ahli di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa model-model yang dikemukakan oleh para ahli, mempunyai fokus yang hampir sama, akan tetapi setiap model menurut para ahli memiliki beberapa faktor yang menonjol, hal tersebut dikarenakan setiap model implementasi mempunyai indikator tersendiri sesuai dengan lingkungan kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subarsono (2022). Hal tersebut dikarenakan teori Van Meter dan Van Horn sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana terdapat enam indikator yang dapat membantu menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan PKH dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus yang sesuai dengan kerangka pikir yang telah dibuat.

2.4 Program Keluarga Harapan (PKH)

2.4.1 Pengertian PKH

PKH adalah salah satu program perlindungan sosial di Indonesia yang berbentuk bantuan sosial. Sasaran dari bantuan ini adalah keluarga miskin dan rentan miskin dengan beberapa persyaratan tertentu dimana keluarga tersebut terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan secara khusus memiliki tujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dalam dunia internasional program ini juga dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT). Sejak pertama kali diimplementasikannya PKH pada tahun 2007, PKH sudah berhasil menekan angka kemiskinan dan dapat mendorong kemandirian penerima bantuan sosial, yang selanjutnya disebut sebagai

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2021).

PKH juga dapat diartikan sebagai program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada seseorang atau keluarga miskin dan rentan yang sudah terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, data tersebut diolah oleh Pusat Data dan PKH. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi pemberdayaan sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, pelayanan dasar, dan rehabilitasi sosial. Proses penyaluran dana bantuan secara non tunai diimplementasikan terhadap bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan Pemberi Bantuan Sosial. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan dengan tujuan untuk mendukung proses implementasi program perlindungan sosial yang berkelanjutan, terarah, dan terencana dalam bentuk PKH sebagai bantuan sosial bersyarat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, serta dapat mengurangi beban pengeluaran. Pemberian bantuan sosial PKH merupakan salah satu upaya dalam memutus rantai kemiskinan dan kesenjangan dengan cara mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Takaredase et al., 2019).

2.4.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan dari PKH yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan taraf hidup KPM dengan memberikan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin atau rentan, dan mengurangi beban pengeluaran.

3. Membangun kemandirian dan menciptakan perubahan perilaku KPM dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kesenjangan dan kemiskinan
5. Mengenalkan manfaat dari produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

2.4.3 Kriteria Penerima Manfaat PKH

Penerima bantuan PKH bisa dibedakan berdasarkan komponen, komponen tersebut diantaranya yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Adapun kriteria dari setiap komponen tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Komponen Kesehatan

Kriteria penerima dalam komponen kesehatan yaitu terdapat ibu hamil/nifas atau sedang menyusui, selain itu terdapat anak usia dini dengan rentang umur 0 - 6 tahun yang belum bersekolah.

2. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima dalam komponen pendidikan yaitu terdapat anak sekolah. Anak sekolah yang dimaksud yaitu anak berusia 6 - 21 tahun yang sedang menempuh pendidikan di tingkat SD/MI sederajat, SMP/Mts sederajat, dan SMA/MA sederajat.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima dalam komponen kesejahteraan sosial yaitu terdapat seseorang yang berusia lanjut dalam keluarga, atau terdapat penyandang disabilitas berat yang dalam hal ini kedisabilitasnya sudah tidak mampu untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dan sudah tidak mampu menghidupi diri sendiri.

2.4.4 Alur Pelaksanaan PKH

Mengacu pada pedoman pelaksanaan PKH 2021, proses pelaksanaan PKH meliputi beberapa tahapan, tahapan tersebut yaitu:

1. Perencanaan

Proses perencanaan dilaksanakan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon KPM. Jumlah dan lokasi calon KPM berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun dapat dikecualikan untuk korban bencana sosial, bencana alam, dan untuk komunitas adat terpencil (KAT). Penetapan calon penerima PKH ditetapkan langsung oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia.

2. Pertemuan Awal dan Validasi

Pendamping sosial PKH melakukan proses sosialisasi dalam Pertemuan Awal (PA) untuk memberikan pemahaman kepada calon penerima manfaat tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH.

3. Penetapan KPM PKH

KPM PKH ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dengan mengacu pada existing hasil pemutakhiran data dan hasil validasi calon penerima PKH sesuai dengan kriteria kepesertaan PKH. Data yang status rekeningnya sudah aktif maka selanjutnya akan ditetapkan menjadi KPM PKH. Proses penetapan KPM PKH ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.

4. Penyaluran Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial untuk KPM PKH berlangsung secara bertahap dalam satu tahun anggaran berjalan, sesuai dengan skema penyaluran bansos yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bentuk bantuan yang diberikan yaitu berupa uang yang disalurkan secara non tunai kepada keluarga, seseorang, atau masyarakat miskin yang telah ditetapkan. Bantuan sosial

yang telah diterima oleh KPM PKH dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan, kesehatan, modal usaha, kesejahteraan sosial, dan kebutuhan lain yang dapat mendukung tercapainya tujuan PKH.

5. Pemutakhiran Data

Proses pemutakhiran data bertujuan untuk memperoleh kondisi terkini dari anggota KPM PKH. Data yang sudah diperoleh tersebut digunakan untuk data dasar program perlindungan sosial. khusus untuk PKH, data tersebut digunakan dalam proses verifikasi, penyaluran, dan penghentian bantuan.

6. Verifikasi Komitmen

Verifikasi komitmen adalah suatu proses yang bertujuan untuk memastikan seluruh penerima manfaat PKH terdaftar, hadir dan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan secara rutin sesuai dengan peraturan pendidikan, protocol kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kegiatan entri data verifikasi komitmen dilaksanakan oleh pendamping setiap bulan dengan menggunakan aplikasi e-PKH dalam mencatat kehadiran dari seluruh KPM pada setiap kunjungan ke layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Data hasil dari entri verifikasi komitmen tersebut menjadi salah satu acuan penangguhan, penyaluran, atau penghentian bantuan.

7. Pendampingan

Pendampingan diperlukan untuk mendukung percepatan tercapainya salah satu tujuan PKH, yaitu dapat menciptakan kemandirian dan perubahan perilaku KPM terkait dengan pemanfaatan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut maka pendamping sosial PKH mempunyai peran dan fungsi dalam mediasi, advokasi, fasilitasi, edukasi dan motivasi bagi KPM PKH. Pelaksanaan pendampingan tidak hanya berfokus pada pendampingan perorangan bagi KPM PKH yang sedang

terkendala atau membutuhkan akses layanan, tetapi juga melakukan pendampingan terhadap kelompok. Pendampingan terhadap kelompok KPM PKH tersebut dapat dilaksanakan oleh pendamping sosial PKH dengan cara melakukan Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

8. Transformasi Kepesertaan

Status kepesertaan penerima PKH selama enam tahun, setelah itu diharapkan sudah terjadi perubahan perilaku terhadap penerima bantuan PKH dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta terjadinya peningkatan pada status sosial ekonomi. Transformasi kepesertaan adalah suatu proses pengakhiran sebagai penerima manfaat PKH melalui kegiatan resertifikasi. Hasil resertifikasi tersebut akan digunakan dalam menetapkan status akhir kepesertaan PKH yaitu transisi atau graduasi.

2.5 Kemiskinan

2.5.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merujuk pada kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini mencakup keterbatasan dalam hal makanan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, perawatan kesehatan, dan akses ke layanan dasar lainnya. Kemiskinan merupakan persoalan kemanusiaan, yang artinya kemiskinan akan membawa konsekuensi bahwa terdapat tanggungjawab moral untuk semua orang agar dapat memperhatikan kehidupan orang yang berada dalam kemiskinan (Ishartono & Raharjo, 2016).

Kemiskinan adalah masalah sosial yang kompleks dan multi-dimensi. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan, antara lain:

1. Faktor Ekonomi: Kurangnya lapangan kerja yang memadai, rendahnya pendapatan, ketimpangan pendapatan, dan akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi adalah faktor-faktor ekonomi yang berperan dalam kemiskinan. Individu atau keluarga yang tidak memiliki pekerjaan yang layak atau memiliki pendapatan yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kemiskinan.
2. Faktor Pendidikan: Pendidikan yang terbatas atau tidak memadai juga dapat menyebabkan kemiskinan. Kurangnya akses ke pendidikan yang berkualitas dapat membatasi peluang pendidikan dan keterampilan, yang pada gilirannya mempengaruhi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan meningkatkan pendapatan.
3. Faktor Kesehatan: Masalah kesehatan yang serius dapat menyebabkan kemiskinan atau memperburuk kondisi kemiskinan yang ada. Biaya perawatan kesehatan yang tinggi, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, dan penyakit yang kronis atau menular dapat menghambat kemampuan individu atau keluarga untuk mencapai kestabilan ekonomi.
4. Faktor Sosial: Diskriminasi, ketidaksetaraan gender, konflik, dan ketimpangan sosial juga dapat memainkan peran penting dalam menciptakan dan mempertahankan kemiskinan. Kelompok-kelompok marginal, termasuk minoritas etnis, orang cacat, atau perempuan, mungkin menghadapi hambatan yang lebih besar dalam mengakses sumber daya dan peluang.

Kemiskinan dapat diukur dalam beberapa dimensi, termasuk aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan akses terhadap pelayanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali menghadapi ketidakstabilan ekonomi, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Penyebab kemiskinan sangat

kompleks dan dapat melibatkan faktor-faktor seperti kurangnya lapangan kerja, rendahnya pendapatan, kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, konflik sosial atau politik, kurangnya akses terhadap sumber daya alam, serta ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kemiskinan juga seringkali terkait erat dengan siklus kemiskinan, di mana kemiskinan dapat diturunkan dari generasi ke generasi.

Dampak kemiskinan dapat sangat merugikan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak tersebut meliputi:

1. Kesehatan: Kemiskinan sering terkait dengan kondisi kesehatan yang buruk dan risiko penyakit yang lebih tinggi. Keterbatasan akses terhadap perawatan kesehatan, gizi buruk, dan lingkungan yang tidak sehat dapat menyebabkan peningkatan angka kematian dan penyakit yang terkait dengan kemiskinan.
2. Pendidikan: Kemiskinan dapat menghalangi akses dan partisipasi dalam pendidikan. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan sering menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, dan mereka mungkin terpaksa putus sekolah lebih awal. Ini membatasi peluang mereka untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pekerjaan yang baik di masa depan.
3. Keterbatasan Peluang: Kemiskinan dapat membatasi peluang sosial dan ekonomi. Individu yang hidup dalam kemiskinan sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pekerjaan yang layak, modal usaha, dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka.

Mengatasi kemiskinan melibatkan intervensi dan kebijakan yang komprehensif. Ini termasuk program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, pendidikan yang berkualitas, pembangunan infrastruktur, penciptaan

lapangan kerja, kebijakan yang mengurangi ketimpangan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Pendekatan yang holistik dan terpadu diperlukan untuk mengatasi masalah kompleks ini dan memberikan jalan keluar bagi individu dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Organisasi internasional, pemerintah, dan masyarakat sipil sering bekerja sama untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup pengentasan kemiskinan di seluruh dunia

2.5.2 Rantai Kemiskinan

Rantai kemiskinan adalah konsep yang digunakan dalam ekonomi dan ilmu sosial untuk menjelaskan bagaimana kemiskinan dapat ditransmisikan atau diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau dari satu individu ke individu lainnya dalam suatu masyarakat. Rantai kemiskinan menggambarkan pola dimana faktor faktor tertentu, seperti ketidakmampuan akses pendidikan yang layak, kurangnya peluang pekerjaan yang layak, dan keterbatasan akses ke sumber daya ekonomi, dapat membuat individu atau keluarga terjebak dalam kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan tercipta karena kurangnya pendapatan dan bukan karena kekurangan kemampuan, yang mana artinya seseorang menjadi miskin karena kurangnya kesempatan untuk menghasilkan pendapatan sehingga ia menjadi miskin (Fachrurozi, 2009).

Beberapa elemen utama dalam rantai kemiskinan yaitu meliputi:

1. Kurangnya Akses ke Pendidikan: Individu yang tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas atau yang terpaksa putus sekolah memiliki peluang yang lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berpenghasilan tinggi.
2. Kurangnya Peluang Pekerjaan: Kemiskinan dapat ditransmisikan jika individu tidak memiliki akses ke pekerjaan yang layak atau peluang untuk berkembang dalam karier mereka.

3. Warisan Kemiskinan: Keluarga yang sudah miskin cenderung memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas, dan ini bisa mengarah pada warisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4. Kurangnya Akses ke Pelayanan Kesehatan: Kesehatan yang buruk atau kurangnya akses ke perawatan kesehatan dapat membatasi kemampuan individu untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan yang mencukupi.
5. Ketidakstabilan Perumahan: Kesulitan dalam mempertahankan tempat tinggal yang stabil dapat menjadi faktor yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial dalam keluarga.
6. Pengangguran dan Ketidakpastian Ekonomi: Orang yang sering mengalami pengangguran atau memiliki pekerjaan dengan upah rendah cenderung memiliki risiko lebih tinggi terjebak dalam kemiskinan.
7. Siklus Kemiskinan: Rantai kemiskinan menciptakan siklus di mana kemiskinan terus-menerus mengenai generasi-generasi berikutnya.

2.6 Kerangka Pikir

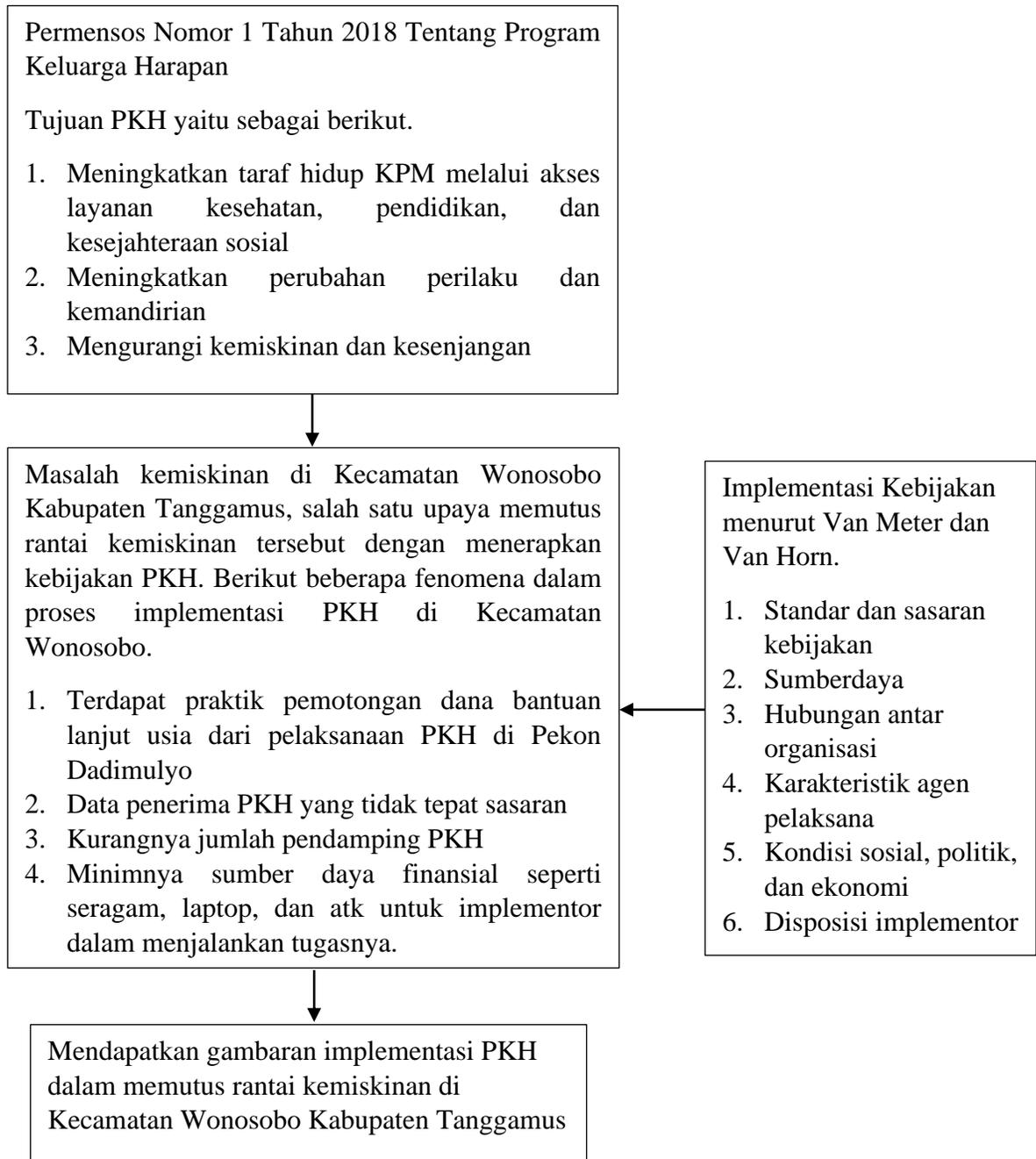
Kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial struktural yang memberi dampak krusial dalam keberhasilan pembangunan manusia, serta memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat, seperti rumah tangga sangat miskin pada pemenuhan kebutuhan kesehatan, kemampuan ekonomi, kebutuhan pendidikan, kebutuhan pemenuhan gizi, yang dapat menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain: kebiasaan hidup sehari-hari yang sering menggunakan barang mewah, pendapatan yang rendah, dan perluasan kemiskinan atau dapat diartikan keluarga miskin yang melahirkan keluarga-keluarga baru yang juga miskin.

Salah satu upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan yaitu dengan cara membuat kebijakan PKH. Program ini ditujukan untuk keluarga miskin dengan berfokus dalam meningkatkan taraf hidup KPM melalui peningkatan kualitas

sumber daya manusia khususnya pada bidang kesehatan dan pendidikan. Misi PKH yaitu untuk meningkatkan perubahan perilaku dan kemandirian, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Dalam proses implementasi PKH di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus ditemui beberapa fenomena, Adapun fenomena tersebut yaitu: terdapat praktik pemotongan dana bantuan lanjut usia dari pelaksanaan PKH di Pekon Dadimulyo Kecamatan Wonosobo, ditemuinya data penerima PKH yang tidak tepat sasaran, dan masih kurangnya jumlah SDM PKH. Pada hakikatnya kebijakan PKH yang sudah dibuat oleh pemerintah tidak akan mendapatkan hasil sesuai tujuan jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik.

Beberapa fenomena di atas terjadi karena proses implementasi tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu maka peneliti menggunakan pendekatan implementasi kebijakan menurut pandangan Van Meter dan Van Horn dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran implementasi PKH dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Menurut pandangan Van Meter dan Van Horn terdapat beberapa proses yang mempengaruhi kebijakan, diantaranya yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta disposisi implementor. Masalah dan fenomena yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat melalui kerangka pikir berikut.



Gambar 3. Kerangka Pikir

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, metode ini sesuai dan relevan dengan penelitian yakni untuk mendapatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan PKH dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Pendekatan kualitatif mampu mengungkap secara menyeluruh mengenai tahapan kebijakan publik dari awal hingga akhir, dan tentang PKH dapat diimplementasikan. Tujuan peneliti memilih pendekatan kualitatif yaitu karena untuk mengetahui bagaimana proses dan mengungkap makna dari setiap fenomena dalam pelaksanaan PKH menurut pandangan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tanggamus dan didukung dengan teoritik yang sudah dibangun dalam kerangka pikir. Peneliti berinteraksi secara *face to face* dengan fasilitator PKH di Kabupaten Tanggamus, khususnya di Kecamatan Wonosobo, dan juga berinteraksi dengan KPM PKH di Kecamatan Wonosobo.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menjadi hal penting dalam penelitian kualitatif, hal tersebut berguna untuk memandu dan mengarahkan penelitian. Fokus penelitian memberikan batasan pada proses pengumpulan data, sehingga proses pengumpulan data lapangan dapat lebih spesifik dan tidak terlalu melebar ke permasalahan lainnya. Penelitian ini berfokus pada proses implementasi, menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Hartawan *et al.*, (2023). Teori ini

menyebutkan bahwa implementasi kebijakan berjalan linear dari implementor, kebijakan publik, dan kinerja kebijakan publik. Terdapat enam indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktifitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial, politik, dan ekonomi; (6) disposisi implementor (sikap pelaksana).

3.2.1 Implementasi Kebijakan PKH dalam Memutus Rantai Kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus

1. Standar dan sasaran kebijakan mempunyai indikator kinerja seberapa jauh tujuan dan standar kebijakan tercapai. Standar dan sasaran kebijakan tersebut meliputi apakah sasaran penerima PKH sudah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan. Dalam penelitian ini standar dan sasaran kebijakan dapat dilihat melalui berbagai dokumen yang membahas tentang PKH, seperti peraturan program dan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan.
2. Sumberdaya dipersiapkan untuk dapat memfasilitasi administrasi agar lebih efektif dan efisien dalam implementasi PKH. Dalam penelitian ini akan membahas siapa saja implementor yang terlibat dalam implementasi PKH, mencari tahu apakah jumlah implementor PKH di Kecamatan Wonosobo sudah mencukupi, dan menanyakan apakah sumber daya non-manusia atau sarana & prasarana seperti laptop, dan perlengkapan lainnya sudah terpenuhi atau belum.
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas memberikan syarat bahwa standar dan tujuan program harus dipahami oleh pelaksana. Pelaksanaan kegiatan dan komunikasi antar organisasi berfokus pada konsistensi dan ketepatan komunikasi antar organisasi atau antar pelaksana, bantuan dalam menafsirkan pedoman dan aturan pejabat yang lebih tinggi, pemahaman program dan tujuan oleh pelaksana, serta dapat memberikan sanksi positif atau negatif. Dalam penelitian ini akan

membahas bagaimana pola komunikasi antar organisasi dalam implementasi PKH yang meliputi kerjasama para implementor dengan Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, instansi pendidikan, dan instansi kesehatan.

4. Karakteristik agen pelaksana meliputi kompetensi dan ukuran staf suatu lembaga, vitalitas organisasi, tingkat kontrol hirarkis keputusan sub-unit dan proses dalam lembaga pelaksana, sumber daya dari lembaga politik (dukungan legislative dan eksekutif), tingkat komunikasi keterbukaan dalam organisasi pelaksana dan dengan pihak eksternal serta hubungan formal dan informal dengan pelaksana kebijakan atau pembuat kebijakan. Berkenaan dengan karakteristik badan pelaksana PKH di Kecamatan Wonosobo, peneliti akan menganalisis apakah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan PKH, dan menganalisis kesesuaian pembagian kerja dengan struktur dan SOP yang berlaku.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi berdasarkan pada ketersediaan sumber daya ekonomi untuk mendukung keberhasilan implementasi, opini publik yang muncul terkait dengan isu kebijakan, kondisi ekonomi dan sosial yang dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, sikap elite dalam implementasi kebijakan (menentang atau mendukung), dan memobilisasi kelompok-kelompok kepentingan swasta dalam mendukung atau menentang suatu kebijakan.
6. Disposisi implementor (sikap pelaksana) yaitu meliputi pemahaman pelaksana terhadap kebijakan PKH, arah tanggapan pelaksana (menolak, menerima, atau netral), serta intensitas tanggapan pelaksana. Berkenaan dengan disposisi implementor dalam implementasi PKH, peneliti akan menganalisis bagaimana respon implementor terhadap kebijakan PKH, dan bagaimana sikap implementor dalam menjalankan tugasnya, serta peneliti akan menggali informasi apakah terdapat pengawasan terhadap implementor dalam menjalankan tugasnya.

3.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan PKH

Berdasarkan fokus yang telah disebutkan di atas, terdapat satu fokus lagi dimana peneliti mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan PKH dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan terletak di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian yaitu karena di Kecamatan Wonosobo tercatat memiliki KPM PKH terbanyak kedua di Kabupaten Tanggamus hal tersebut menandakan bahwa masih banyaknya keluarga miskin yang membutuhkan bantuan untuk terlepas dari kemiskinan, disamping itu dalam pelaksanaannya ditemui dugaan pemotongan dana bantuan yang dilakukan oleh Ketua PKH di Pekon Dadimulyo dan ditemuinya data penerima PKH yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Menurut Sugiyono dalam Rahmawati (2021) data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari tempat penelitian dengan cara wawancara secara langsung dan terbuka bersama informan yang ahli dibidangnya sesuai dengan keperluan data. Data primer bisa berupa opini subjek baik secara kelompok maupun individu. Untuk mendapatkan data primer dapat menggunakan metode *purposive sampling* atau teknik dalam pengambilan

sampel sumber data dengan pertimbangan dalam menentukan informan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama informan yang sudah ditentukan, peneliti menggunakan pedoman wawancara dalam mendapatkan deskripsi terkait implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian dan pembahasan yang berdasarkan dari data pendukung lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pada umumnya data sekunder berupa catatan, bukti, atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan. Peneliti mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini melalui informan dan responden. Informan adalah orang yang mengetahui dengan benar tentang permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan yang dimaksud dengan responden adalah orang yang diminta untuk memberikan informasi terkait penelitian melalui proses wawancara. Pada penelitian ini data sekunder didapat dari pihak fasilitator PKH dan Keluarga Penerima Manfaat PKH Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena maksud utama dari penelitian adalah memperoleh data (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Menurut Marshall (1995) dalam Sugiyono (2013) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna yang melekat pada perilaku tersebut. Observasi umumnya dilaksanakan pada awal kegiatan survey yang bisa dilakukan bersama dengan studi dokumen atau eksperimen. Ada dua tipe observasi, yakni observasi berpartisipasi dan observasi tidak berpartisipasi. Observasi partisipatif merupakan cara pengamatan dengan berpartisipasi dalam kejadian yang sedang diteliti. Adapun data yang diperoleh penulis dari kegiatan observasi ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Wonosobo dan bagaimana peranan PKH dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi.

3.5.2 Wawancara

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2013) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, menghasilkan komunikasi dan konstruksi makna bersama tentang suatu topik tertentu. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) yang merupakan tanya jawab tentang masalah implementasi PKH antara informan dengan peneliti yang dilaksanakan secara terbuka. Untuk itu peneliti menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka sebagai instrument penelitian implementasi PKH yang digunakan dalam memberikan kebebasan bagi informan dalam menyampaikan pendapatnya mengenai “Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus”. Informan pada penelitian ini yaitu mereka yang ditentukan sesuai dengan kepemilikan informasi yang terpercaya mengenai implementasi kebijakan PKH. Informan tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Tempat/Instansi
1.	Fina Oktasari, S.H., M.H.	Kabid Linjamsos	Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
2.	Aris Dwi Arsyah, S.T.	Koordinator PKH Kabupaten Tanggamus	Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus
3.	Andi Maharja, S.H.	Koordinator PKH Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo
4.	Siti Puji Rahayu, S.Si.	Pendamping PKH	Kecamatan Wonosobo
5.	Roni Saputra	Koordinator Puskesmas	Pekon Padang Ratu
6.	Kurmiati	Masyarakat penerima Bantuan PKH	Pekon Dadimulyo
7.	Sumarti	Ketua Kelompok PKH	Pekon Sopyonyo
8.	Elis	Ketua Kelompok PKH	Pekon Padang Ratu

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

3.5.3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan teknik dengan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan, dan karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan diantaranya yaitu peraturan, catatan harian, biografi, sejarah kehidupan, dan kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar, misalnya sketsa, gambar hidup, foto, dan lain-lain (Sugiyono, 2013). Selain itu studi dokumen juga dapat diartikan sebagai suatu kajian yang berfokus pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya (Abdussamad, 2021). Dokumen yang digunakan dalam penelitian tentang implementasi kebijakan PKH dapat berupa gambar, surat keputusan, data-data mengenai implementasi PKH, foto, dan informasi terkait implementasi PKH yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.

Tabel 4. Dokumentasi

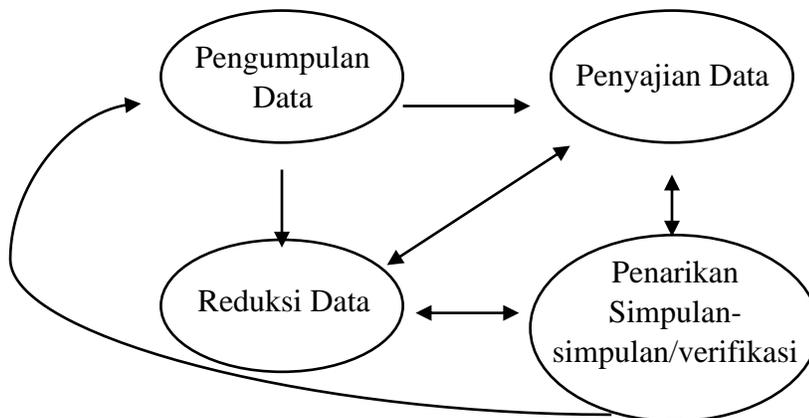
No.	Nama Dokumen
1.	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
2.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Secara Non Tunai
3.	Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Hardani *et al.*, (2020) menyatakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang sudah didapatkan dari catatan lapangan, hasil wawancara, dan bahan-bahan lain, sehingga hasil temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain dan mudah untuk dipahami untuk diri sendiri ataupun orang lain.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga alur kegiatan. Alur tersebut yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan kesimpulan. Peneliti akan menggunakan salah satu model analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman, yaitu model interaktif. Pada model interaktif, reduksi data dan penyajian data berdasarkan hasil data yang telah dikumpulkan, selanjutnya yaitu pada proses penarikan simpulan dan verifikasi, seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 4. Komponen Analisis Data: Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman (1992) dalam Hardani *et al.*, (2020)

3.6.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah bagian analisis yang dapat mempertajam, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, menggolongkan, dan mengorganisasi data

dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan-simpulan selanjutnya bisa ditarik dan diverifikasi. Data yang sudah direduksi bisa memudahkan peneliti dalam mendapatkan poin penting, dan dapat lebih mudah dalam memahami hasil penelitian, serta dapat mempermudah proses analisis data bagaimana implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.

3.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang telah tersusun dan dapat memberikan kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian dengan teks naratif, foto atau gambar, bagan, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka dapat memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, dan dapat merencanakan kerja selanjutnya dengan berdasarkan apa yang sudah dipahami tersebut.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan merupakan intisari dari temuan penelitian yang dapat menggambarkan berbagai pendapat terakhir yang didasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Kesimpulan harus dibuat relevan dengan tujuan penelitian, fokus penelitian, dan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan interpretasi dan pembahasan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar dalam validitas data yang sudah diperoleh peneliti. Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi terhadap

obyek penelitian dengan daya yang bisa dilaporkan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2013) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu meliputi uji, credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas).

3.7.1 Uji *Credibility*

Setiap penelitian wajib mempunyai kredibilitas sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas dalam penelitian kualitatif yaitu keberhasilan dalam mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang bersifat majemuk atau keterpercayaan dengan hasil penelitian. Dalam upaya menjaga kredibilitas penelitian, peneliti melakukan uji kredibilitas yang meliputi cara sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan maka peneliti melakukan pengamatan kembali dengan cara kembali lagi ke lapangan, sehingga dapat mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh ataupun untuk menemukan data-data terbaru.

2. Triangulasi

Triangulasi data dapat diartikan sebagai pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai waktu dan berbagai cara untuk mendapatkan data yang valid dengan cara mengecek kebenaran informasi yang ada di lapangan. Informasi tersebut perlu dicek kebenarannya supaya hasil penelitian dapat dipercaya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Apabila ditemui perbedaan keterangan antara informan yang sudah memberikan informasi terkait implementasi PKH, maka peneliti akan menanyakan kembali perbedaan keterangan tersebut kepada informan lainnya yang dianggap relevan, sehingga mendapatkan suatu kebenaran.

3.7.2 Uji *Transferability*

Transferability adalah validitas eksternal dalam suatu penelitian kualitatif, teknik ini mengharuskan peneliti untuk melaporkan hasil penelitiannya sehingga deskripsinya itu dilakukan secara teliti dan secermat mungkin yang mampu menggambarkan bagaimana tempat penelitian diselenggarakan. Deskripsinya harus bisa mengungkapkan secara khusus agar bisa dipahami. Temuan pada penelitian tersebut adalah penafsiran yang diselesaikan dalam bentuk uraian rinci yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.7.3 Uji *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan cara mengaudit keseluruhan dari proses penelitian. Caranya yaitu dilakukan oleh pembimbing yang dapat melakukan audit keseluruhan kegiatan peneliti dalam melakukan penelitian.

3.7.4 Uji *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* hampir sama dengan uji *depenability*, sehingga proses pengujiannya bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Uji *confirmability* berarti menguji hasil dari penelitian yang selanjutnya dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan mengenai implementasi kebijakan PKH dalam memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan menyimpulkan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus. Adapun kesimpulan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus sudah berjalan dengan cukup baik. Pada indikator standar dan sasaran kebijakan sudah menunjukkan bahwa kebijakan PKH sudah jelas dan terukur sehingga kebijakan tersebut dapat direalisasikan. Selain itu implementasi PKH dapat berjalan karena adanya komunikasi yang baik antar organisasi dengan implementor PKH. Implementasi PKH juga mempengaruhi indikator kondisi sosial, dan ekonomi, yaitu dalam hal kondisi sosial berubahnya pola pikir KPM PKH menjadi lebih baik lagi, yang mana KPM PKH terpacu untuk dapat menyekolahkan anaknya, dan peduli akan kesehatan keluarganya, sehingga dapat menciptakan keluarga yang berpendidikan, sehat, dan sejahtera, sedangkan dalam hal ekonomi dapat mengurangi beban pengeluaran dan terbentuknya kelompok UMKM yang memanfaatkan hasil bumi yang ada disekitar Kecamatan Wonosobo. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa masalah, masalah tersebut terdapat dalam indikator sasaran kebijakan dan sumber daya, yang mana belum tepatnya sasaran

penerima bantuan PKH, masih kurangnya jumlah SDM PKH, masih kurangnya dukungan sumber daya non-manusia atau kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung implementor dalam menjalankan kegiatan PKH, dan masih terdapat masalah pemotongan dana bantuan yang dilakukan oleh ketua kelompok PKH di Pekon Dadimulyo Kecamatan Wonosobo. Namun terlepas dari hal tersebut pada indikator disposisi implementor, pendamping PKH menyikapi kebijakan ini dengan positif, dan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

2. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh faktor dukungan, yang mana seluruh instansi baik dari bidang pendidikan, kesehatan, maupun aparat desa mendukung dalam seluruh kegiatan PKH, sudah terdapat Puskesmas sebagai perpanjangan tangan dari Dinsos di tingkat desa, dan sudah mulai munculnya kesadaran dari diri KPM PKH untuk dapat merubah pola pikirnya. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu dipengaruhi oleh faktor informasi yaitu masih terkendala susah sinyal di desa, sehingga menghambat dalam proses penginputan data KPM. Selain itu dipengaruhi juga oleh faktor isi kebijakan, yang mana masih banyak KPM PKH yang tidak menggunakan dana bantuannya sesuai dengan komponen yang telah ditentukan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan PKH dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Studi di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)” maka peneliti memberikan saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki proses implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Wonosobo. Adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan jumlah SDM PKH dalam hal ini yaitu pendamping di Kecamatan Wonosobo. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat memaksimalkan kinerja para implementor, sehingga dapat fokus mendampingi KPM PKH.
2. Perlu adanya dukungan sumber daya non-manusia yaitu sarana dan prasarana untuk implementor PKH. Dukungan tersebut yaitu berbentuk fasilitas seperti laptop, proyektor, ATK, pengeras suara, dll. Dengan adanya fasilitas yang lengkap maka dapat memudahkan implementor dalam proses implementasi PKH.
3. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara implementor PKH dengan aparat pemerintah pusat maupun daerah, instansi pendidikan, instansi kesehatan, maupun instansi lainnya yang ada di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus.
4. Perlu adanya evaluasi rutin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus terkait dengan kinerja implementor PKH yang ada di Kecamatan Wonosobo, sehingga dapat meminimalisir kejadian jarang dilakukannya kegiatan pendampingan atau P2K2.
5. Untuk membuat KPM PKH yang sudah dianggap mampu agar dapat melakukan graduasi mandiri, maka perlu adanya reward agar KPM PKH tersebut terpacu untuk melakukan graduasi mandiri, reward tersebut bisa berupa bantuan dana usaha atau sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); Cetakan 1.). CV. Syakir Media Press.
- Abidin, S. Z. (2019). Kebijakan Publik. In D. A. Halim (Ed.), *Salemba Humanika* (Edisi 4). Salemba Humanika.
- Anggara, S. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik* (Cetakan ke). CV. Pustaka Setia.
- Azizah, N. (2021). *Implementasi Program Indonesia Pintar pada Jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 17 Bone Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- BPS Kabupaten Tanggamus. (2022a). Kabupaten Tanggamus dalam Angka 2022. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus*, 1–364.
- BPS Kabupaten Tanggamus. (2022b). *Kecamatan Wonosobo Dalam Angka*.
- BPS Provinsi Lampung. (2023). *Profil Kemiskinan di Lampung September 2022*. 07(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1807>
- Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *Jurnal Professional (Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik)*, 9(1), 109–116.
- Fachrurozi. (2009). Memutus Rantai Kemiskinan. *Jurnal Analisis Sosial*, Vol.14(No.2), 118–126.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)* (R. Sikumbang (ed.)). Ghalia Indonesia.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), *Repository.Uinsu.Ac.Id* (Cetakan 1, Issue April). Pustaka Ilmu.

- Hartawan, R. C., Kosasih, F., & Rochmani. (2023). Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)*, 2(4), 1348–1358. <https://ijhess.com/index.php/ijhess/>
- Ibrahim, I. (2022). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato. *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 113–137. <http://sim.ihdn.ac.id/app-assets/repo/repo-dosen-092006103006-57.pdf>
- Ishartono, & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Share : Social Work Journal*, 6(2), 159. <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198>
- Linawati, A. (2016). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur*. Universitas Lampung.
- Mahardhani, A. J. (2018). Advokasi Kebijakan Publik. In *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. (Vol. 1, Issue 69). Calina Media.
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In M. Nizar (Ed.), *Analisis Kebijakan Publik*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)* (Cetakan Pe, Vol. 1). LeutikaPrio.
- Permana, A. C., Sasmito, C., & Gunawan, C. I. (2018). IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN DI KOTA MALANG (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(2), 64–74.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In Sutoyo (Ed.), *Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Pratama, R. A., Broto, M. F., & Persada, R. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 1–19.
- Rahmawati, I. (2021). *Implementasi Kebijakan Graduasi dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) (Studi Kasus pada PKH di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waykanan Tahun 2021)*. Universitas Lampung.
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan

Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68–74. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>

Subarsono. (2022). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)* (Cetakan XI). Pustaka Pelajar.

Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*. Brilliant.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Takaredase, J. T., Kaawoan, J. E., & Singkoh, F. (2019). Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/27037/26630>

Yulianti, D. (2018). Implementasi Program Kemitraan Dalam Corporate Social Responsibility (Csr) Melalui Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan. *Jurnal Sosiologi*, 20(1), 11–21.

Yulizar, F. S. P. (2022). *Keberhasilan Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.

Dokumen :

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Presiden Republik Indoneisa Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Secara Non Tunai

Sumber Lainnya :

Irawan. (2023). Dibanjiri Protes! Dugaan Pemotongan Bansos PKH di Tanggamus. Diakses di <https://net24jam.id/dibanjiri-protos-dugaan-pemotongan-bansos-pkh-di-tanggamus/>. Pada tanggal 20 Januari 2023

Lampung7news. (2019). Data Program Keluarga Harapan (PKH) Pekon Dadimulyo Wonosobo Diduga Tebang Pilih, Diakses di <https://lampung7.com/data-program-keluarga-harapan-pkh-pekon-dadimulyo-wonosobo-diduga-tebang-pilih/>. Pada tanggal 21 Februari 2023